

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN MAKROMAN  
KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Oleh : Salasiah

---

---

**ABSTRACT**

*In the current era of regional autonomy, the concept of development should be implemented in every region in Indonesia is development that involves the public in any process. The process is meant in this case, ie not only at the planning stage, but also at the stage of development project implementation, monitoring and evaluation stages of development results. With the issuance of regulations by the government to support the concept, it is expected to generate development in accordance with the needs of society as well as the construction of object subject development practitioners.*

*With the implementation of research Makroman Sub Samarinda, Samarinda Ilir. This is expected to provide an overview of how community participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied to measuring and can be used as a reference in future studies related to the substance of the discussion.*

*From the research that has been carried out, it can be illustrated that the application of participatory development in the Village Makroman if musrenbang refer to the results that have been recorded on BAPPEDA of Samarinda, the results obtained are in the planning stages, although people still participate, but at this stage of the implementation of community participation expected No not at all because it was found by the implementation phase of the project carried out by the contractor winning bidder. However, if we refer to the development projects undertaken by the three empowerment program that runs in the Village Makroman, primarily by PNPM Mandiri Village in the study found that people's enthusiasm to participate in every stage of development that started in the planning, implementation, until the evaluation phase the project is very high. It can be concluded in the implementation phase are still many things that must be addressed.*

---

**Keywords : participation, monitoring, evaluation**

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahannya setiap negara selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu, sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigim pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan *top down*) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Hasil penelitian W. Boyers tahun 1985 menyimpulkan bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam (*top-down*) dengan program yang idominasi oleh pemerintah pusat.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: "***Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda***".

## 1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana

harus memulai, ke mana harus pergi dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Samarinda Khususnya di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir?”*.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian (Hasan, 2002:44).

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: ***“Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Samarinda Khususnya di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir”***.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya implementasi perencanaan partisipatif, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu Administrasi dan bagi kalangan penulis lainya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (*trial and error*), (Sugiyono, 2004:55).

Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

#### 2.1.1. Konsep Pelaksanaan

Secara sederhana, pelaksanaan bisa juga disebut sebagai implementasi. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### 2.1.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peranserta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A.

Santoso Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan."

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat *urgent*, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun di dalam menerima hasil pembangunan.

Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap *Assesment*. Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap *Alternative Program* atau *Kegiatan*. Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
3. Tahap *Pelaksanaan (Implementasi) Program* atau *Kegiatan*. Dilakukan dengan

melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil). Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

### **2.1.3. Unsur-Unsur Partisipasi**

Menurut Keith Davis (Sastropoetro, 1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.

### **2.1.4. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat**

#### **a. Bentuk-bentuk partisipasi**

Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro, 1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti

(biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.
6. Aksi massa.
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.
2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
4. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan.
5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun perlu dilibatkan.

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Di samping itu untuk mensukseskan pembangunan, proses penyusunan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan akan tercapai.

#### **b. Jenis-jenis partisipasi**

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*Psychological participation*).
2. Tenaga (*Physical participation*).
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*).
4. Keahlian (*Participation with skill*).
5. Barang (*Material participation*).
6. Uang (*Money participation*).

Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001:127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

**Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arnstein)**

Tangga Ke-	Bentuk Partisipasi	Kategori
VIII	Pengawasan masyarakat	Tingkat kekuatan masyarakat ( <i>Degrees of Citizen Power</i> )
VII	Pendelegasian kekuasaan dan wewenang	
VI	Kemitraan/ kesetaraan	
V	Peredaman/ kompromi	Tingkatan semu
IV	Berkonsultasi	
III	Menginformasikan	
II	Pengobatan untuk penyembuhan	Bukan partisipasi
I	Manipulasi	

Dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan judul karya ilmiah ini dan dengan melihat model partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka model partisipasi masyarakat yang dimaksud, yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran dalam merencanakan program/proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya.

### 2.1.5. Prasyarat Partisipasi

Menurut Davis dalam Sastropetro (1988:16-18) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

Selanjutnya Hamidjojo dan Iskandar (1974) dalam Sastropetro (1988:29) mengemukakan sebagai berikut:



1. Senasib dan sepenanggungan.
2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup.
3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.
4. Adanya prakarsawan.
5. Iklim partisipasi.
6. Adanya pembangunan itu sendiri.

Dari kedua rumusan di atas pada dasarnya di dalam berpartisipasi, partisipan hendaknya mempunyai suatu kemampuan yang dapat disumbangkannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi didasari pula oleh adanya kecocokan atau kebutuhan dari partisipan itu sendiri, kebutuhan mereka, maka mereka berpartisipasi memanfaatkan dan memeliharanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu Negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

#### **2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:

1. Adanya interes dan partisipan.
2. Hadiah dari suatu kegiatan.
3. Adanya keuntungan dari kegiatan.
4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu pemuka masyarakat/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (1998:33) sebagai berikut: "Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar peranannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat."

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

### 2.1.7. Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan

Oakley (1991:14), berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Adi dan Laksmono (1990:174) dalam tesis M. Arifin (2007:37), partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial karena:

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil.
2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan persiapan, sehingga mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah milik mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara berpikir, merasa dan bertindak.
3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi yang bersifat dasar, di mana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan, ini dimaksudkan untuk memberi keuntungan manusia.

Menurut Dr. Lestaire White dalam tulisannya "*Introduction to Community Participation*", yang dikutip oleh Sastropetro (1988:33), mengemukakan 10 (sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan partisipasi, lebih banyak hasil kerja yang dicapai;
2. Dengan partisipasi, pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya yang murah;
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya;
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya;
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggungjawab;
6. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah diusulkan;
7. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.

9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Di samping itu, mereka juga akan merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.

### **2.1.8. Pengertian Pembangunan**

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan- perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga- lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
  - a. *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  - b. *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak “diisap” orang lain.
  - c. *Freedom From Survitute* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktifitas.
2. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.

4. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: "Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa."

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

#### **2.1.9. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa**

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Sejak dikeluarkannya berbagai instrument hukum berupa peraturan perUndang-Undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) di tahun 1999 yang membuka lebar ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan implementasinya.

Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka digunakan konsep partisipasi di mana konsep partisipasi memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan produk-produk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh Davis dalam Sastropetro (1988:16) yang menyebutkan beberapa dimensi mengenai partisipasi masyarakat.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Bentuk Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko

dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Danim (2002:41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif, yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan;
2. Dilakukan secara survey. Oleh karena itu, penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survey. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali bersifat historis dan eksperimental;
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail;
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Makroman. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011, penulis memilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal Kelurahan Sambutan merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang baik.

### 3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan posyandu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

### 3.4 Informan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purpose sampling*. *Purpose sampling* adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kelurahan Makroman
2. Ketua BPD Sambutan.
3. Tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
4. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Makroman

### 3.5. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam sebuah proyek pembangunan fisik

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Kelurahan Sambutan, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam

memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan, yaitu Camat Samarinda Ilir, para Lurah, Pengurus LPM dan beberapa tokoh masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ilir yang dianggap mengetahui banyak tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Observasi. Observasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kecamatan Samarinda Ilir melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.
3. Dokumentasi. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen rumusan hasil Musrenbang dan dokumen peraturan pemerintah dan Undang- Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

## **4. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Gambaran Umum di Kelurahan Makroman**

#### **4.1.1. Sejarah Pembangunan di Kelurahan Makroman**

Kelurahan Makroman merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Bagian Timur Kota Samarinda. Kelurahan Sambutan dulunya merupakan wilayah Transmigrasi tahun 1974, setelah terjadinya pemekaran, Kelurahan Makroman sampai saat ini terdiri dari 2 dusun, yakni Kelurahan Makroman. Dinamakan Makroman karena dusun tersebut berada pada dataran tinggi, sedangkan Dusun Pulau Atas dinamakan Makroman karena dulunya dusun tersebut merupakan lokasi penyimpanan hasil panen, masyarakat juga biasa menyebutnya dengan nama Makroman (Lumbung Padi). Hal tersebut dikarenakan oleh mata pencaharian masyarakat saat itu yang mayoritas bertani.

#### **4.1.2. Keadaan Geografis Desa**

Secara geografis Kelurahan Makroman terletak di sebelah Timur dengan jarak sekitar 10 Km dari ibu kota Samarinda. Sementara posisi wilayah Kelurahan Makroman berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara: Pulau Atas

- Sebelah Timur: Sambutan
- Sebelah Selatan: Sei Kaphi
- Sebelah Barat: Sei Pinang Luar

Sebagai bagian pemerintahan kecamatan, luas wilayah Kelurahan Makroman, yakni sekitar 12,27 km<sup>2</sup> yang secara umum merupakan daerah dataran tinggi dan beriklim tropis dengan 2 musim, yakni hujan dan kemarau, serta sebagian besar digunakan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dalam hal mata pencaharian, penduduk Kelurahan Sambutan mayoritas adalah bertani, berkebun dan beternak ayam.

#### 4.1.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa

Kelurahan Makroman terdiri atas dua (2) dusun dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 RT. Berikut table daftar nama dusunnya dan jumlah RT-nya:

**Tabel 4.1. Nama Dusun dan Jumlah RT Kelurahan Makroman**

Nama Dusun	Jumlah RT
Pulau Atas	11
Sambutan	13

Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman

##### a. Visi

Berdasarkan hasil musyawarah bersama, maka visi Kelurahan Makroman yang telah ditetapkan untuk jangka 5 tahun (2011-2015) adalah: “Menjadikan Kelurahan Makroman **sebagai pusat pengembangan pertanian**”

##### b. Misi

Adapun misi yang diembang dalam rangka pencapaian visi Kelurahan Makroman. Sambutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya di bidang pertanian;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan
3. Peningkatan hasil produksi pertanian dan pemasaran.

## 4.2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### 4.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Sambutan terdiri atas 606 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa adalah 1575 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki:

**Tabel 4.2. Persentase Jumlah Penduduk Kelurahan Makroman Berdasarkan Jenis Kelamin**

Laki-Laki	Perempuan	Total
765 Jiwa	810 Jiwa	1575 Jiwa

Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman

#### 4.2.2. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah kepala keluarga sejahtera dan kepala keluarga pra sejahtera di Kelurahan Makroman:

**Tabel 4.3. Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Kelurahan Makroman**

Sejahtera	Pra Sejahtera	Total
428 KK	97 KK	525 KK

Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman

#### 4.2.3. Mata Pencarian

Kelurahan Makroman merupakan desa yang terletak di bagian Timur Kecamatan Samarinda Ilir dengan presentase perbandingan jenis mata pencaharian penduduknya sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Presentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Makroman**

Mata Pencaharian	Presentase
Petani	80 %
Peternak	5 %
PNS	5 %
Lain	10 %

Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman

#### 4.3. Sarana dan Pra Sarana

Gambaran umum sarana dan pra sarana yang terdapat di Kelurahan Makroman saat ini dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, antara lain sarana umum, sarana pendidikan, sarana keagamaan dan pra sarana transportasi.

##### 4.3.1. Sarana Umum

Sarana Umum yang dimiliki oleh Kelurahan Makroman saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut beserta jumlahnya:

**Tabel 4.5. Persentase Jumlah Sarana Umum Kelurahan Makroman**

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Kantor Desa	<b>1 Unit</b>
Gedung Pertemuan	-
Lapangan Olah Raga	<b>1</b>

Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman

#### **4.3.2. Sarana Pendidikan**

Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia, maka dalam bidang pendidikan sarana yang dimiliki oleh Kelurahan Makroman, yakni:

**Tabel 4.6. Persentase Sarana Pendidikan Kelurahan Makroman**

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
PAUD	2
TK	2
SD	2

Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

#### **4.3.3. Sarana Keagamaan**

Dalam memenuhi kebutuhan religi masyarakat di Kelurahan makroman yang secara keseluruhan memeluk agama Islam, maka berikut merupakan table jumlah sarana keagamaan di Kelurahan makroman.:

**Tabel 4.7. Persentase Sarana Keagamaan Kelurahan makroman**

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	5

Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

#### **4.3.4. Prasarana Transportasi**

Dalam hal akses transportasi masyarakat desa, maka saat ini prasana transportasi yang dimiliki oleh Kelurahan makroman adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8. Persentase Prasarana Kelurahan makroman**

<b>Jalan</b>	<b>Panjang</b>
Provinsi	5 Km
Kabupaten	4 Km
Desa	7 Km

Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

## **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Dalam bab ini akan disajikan data/informasi yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kecamatan Samarinda Ilir, Nomor: 04/PNPM-MP/PR/SPCII/VII/2010 sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Forum Masyarakat Antar Desa Kecamatan Samarinda Ilir yang diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Juli 2010 bahwa Desa/Kelurahan penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010/2011. Untuk Kelurahan Makroman adalah senilai Rp 63.119.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan Makroman disepakati bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dalam bentuk fisik dan pengadaan peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, proyek pembangunan POSYANDU ini dijadikan tolak ukur dalam membahas partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir yang secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang dan partisipasi uang.

## 5.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Makroman

Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua BPD Timoreng Panua: "Dalam penggalian usulan, digali dari setiap dusun, apakah di satu dusun itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, bergantung dari kondisi geografis dusun tersebut (susah dijangkau karena medannya yang sulit ataukah factor lainnya) ini supaya semua kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat tercover" (*Ketua BPD Kelurahan Makroman, wawancara: 4 April 2011*).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa sangat baik begitu pula dengan penyambutan dari masyarakat yang begitu antusias dalam setiap kegiatan pembangunan.

Demikian pula yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa: "Kalau untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi masyarakat tidak ada" (*Tokoh masyarakat, wawancara : 31 Maret 2011*).

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika proyek dari hasil MUSRENBANG yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, maka akan menjadi hal yang mustahil dilakukan, sehingga dengan demikian mesti ada opsi lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti, yaitu dengan menjadikan salah satu proyek dari PNPM-MP yang diperoleh Kelurahan Makroman sebagai tolak ukurnya dalam hal ini proyek yang dianggarkan untuk tahun 2010, yakni pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang selanjutnya secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang dan partisipasi uang.

### 5.1.1. Partisipasi Pikiran

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek PNPM-MP tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam

pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali proyek pembangunan POSYANDU. Hal ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Pada awalnya, masyarakat Kelurahan Makroman cenderung tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh maka masyarakat mulai memahami dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan proyek POSYANDU. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Kelurahan Makroman bahwa: "Memperjuangkan pengadaan POSYANDU di Kelurahan Makroman bukanlah upaya baru. Masyarakat Kelurahan Makroman sangat membutuhkan adanya Pos Pelayanan Terpadu - Mandiri Pedesaan. Akhirnya upaya tersebut baru terealisasi pada tahun 2010. Keputusan tentang pengadaan POSYANDU bukanlah merupakan keputusan Kepala Desa/kelurahan dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari warga desa utamanya tokoh-tokoh masyarakat" (*Kades Kelurahan Makroman, wawancara: 29 Maret 2011*).

Ungkapan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut, tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri, akan tetapi itu juga merupakan keinginan warga desa secara keseluruhan.

### **5.1.2. Partisipasi Tenaga**

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik PNPM-MP. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong-rotong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya mesjid, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, Kepala Desa beserta aparatnya harus mampu

menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi seseorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Seperti yang di kemukakan oleh kepala dusun, bahwa : “Masyarakat mau ikut berpartisipasi Karena mereka berpikir selain mereka ingin melihat pembangunan di daerahnya baik juga mereka berpikir bahwa hal tersebut juga bermanfaat bagi diri mereka” (**Kepala Kelurahan Makroman, wawancara: 4 April 2011**).

### **5.1.3. Partisipasi Keahlian**

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dikemukakan oleh Ketua BPD Kelurahan Makroman, bahwa: “Bila dibandingkan proyek-proyek pembangunan di desa ini yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 dengan proyek pembangunan yang ditangani oleh PNPM Mandiri Pedesaan yang melibatkan masyarakat, akan sangat berbeda. Proyek yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 sudah mulai rusak meski baru beberapa lama selesai pengerjaannya sedangkan yang dilaksanakan oleh PNPM kualitasnya lebih bagus, karena memang melibatkan tukang terbaik di desa ini yang juga turut berswadaya”. (**Ketua BPD Timoreng Kelurahan Makroman: 31 Maret 2011**).

Informasi ini mengindikasikan bahwa: (a) terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian; (b) tanggung jawab terhadap kualitas hasil, lebih tinggi pada proyek PNPM-MP dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh proyek-proyek yang ditangani oleh pihak ke-3; dan (c) pemeliharaan terhadap proyek PNPM-MP lebih baik dari pada pemeliharaan terhadap hasil-hasil proyek yang ditangani oleh pihak ketiga. Hal ini dapat dimaklumi, karena proyek PNPM-MP oleh masyarakat Kelurahan Makroman dianggap sebagai milik sendiri, sedangkan proyek yang ditangani pihak ke-3 dianggap sebagai milik negara atau daerah yang harus dijaga dan dirawat oleh negara atau daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Dusun, bahwa: “Semua pekerja proyek



adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya". (**Kepala Kelurahan Makroman, wawancara: 4 April 2011**).

Informasi dari Kepala Kelurahan Makroman ini menunjukkan bahwa warga Kelurahan Makroman khususnya kaum laki-laki yang berada di Makroman banyak yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, tukang kayu dan petani lainnya yang mereka peroleh dari pengalaman langsung di lapangan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Dengan keahlian yang mereka miliki, dapat dimanfaatkan dan diarahkan secara optimal dalam rangka pengerjaan proyek-proyek PNPMP dimasa yang akan datang.

#### **5.1.4. Partisipasi Barang**

Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPMP. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proyek pembangunan pisik POSYANDU memiliki dana sebesar Rp 63.119.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada pertemuan Desa, oleh Kepala Kelurahan Makroman (hasil wawancara: 29 Maret 2011) menyampaikan secara transparan jumlah tersebut. Beliau menyampaikan bahwa untuk pengadaan POSYANDU yang memadai, tentunya dana tersebut belumlah cukup. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan pisik POSYANDU tersebut. Himbuan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga dan tokoh masyarakat. Sambutan positif dimaksud adalah pemberian secara sukarela beberapa bahan (kayu, paku, pasir dan lain-lain) yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan dalam pengerjaan POSYANDU.

Selanjutnya diinformasikan juga oleh seorang tokoh masyarakat, bahwa: "Menegenai bahan proyek, itu disediakan oleh PNPMP, hanya pengerjaannya yang di kerjakan oleh masyarakat dan pengerjaannya tetap diawasi oleh aparat desa, tim yang bertanggungjawab dan masyarakat sendiri". Namun dalam pelaksanaannya, ada bantuan bahan-bahan tertentu dari anggota masyarakat yang kebetuan memiliki bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut diberikan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain" (**Tokoh Masyarakat-Bpk. Pu'Bari, wawancara: 31 Januari 2011**).

Informasi ini semakin memperkuat fakta bahwa masyarakat Kelurahan Makroman cukup partisipatif dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPMP sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan masyarakat Desa secara keseluruhan.

#### **5.1.5. Partisipasi Uang**

Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman dalam bentuk uang pada saat pembangunan selama kurang lebih empat bulan dilaksanakan. Kalaupun ada, hal itu diwujudkan dalam bentuk rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek. Selain itu, juga karena memang proyek dari PNPM-MP ini memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya dan juga berkat bantuan atau dalam artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsih tenaga dan keahlian yang jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya, sehingga dana yang di anggarkan akan terhemat dan dapat digunakan lagi untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Kelurahan Makroman, bahwa :  
“Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, selama ini belum pernah, Karena dana yang dianggarkan dari PNPM pun Alhamdulillah belum pernah kurang, malahan kadang memiliki sisa dari pengerjaan satu proyek yang dapat dijadikan revisi untuk proyek lain” **(Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Kelurahan Makroman, wawancara: 8 Januari 2011).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sisa dana dari pelaksanaan proyek posyandu, maka dapat dijadikan sebagai indikator bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan Makroman sangatlah baik, sebagaimana yang salah satu alasan dari pentingnya partisipasi dalam kegiatan yang dikemukakan oleh Dr. Lastaire White dalam Sastropetro 1988, yakni dengan partisipasi dari masyarakat, maka hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak dibandingkan pengerjaannya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

## **6. PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka

pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka.

2. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP khususnya pembangunan POSYANDU pada tahun 2010.
3. Kepala Kelurahan Makroman beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP yaitu POSYANDU sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

## **6.2.Saran**

1. Diharapkan agar Kepala Desa/Kelurahan dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kelurahan Makroman guna mendapatkan proyek-proyek PNPM-MP sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.
2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.
3. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Makroman senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Kelurahan Makroman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandia Rukminto. 2001. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Conyers, Diana. 1991. *"An Introduction to Social Planning in The Third World"*. By Jhon Wiley dan Sons Ltd. 1994. Terjemahan Drs. Susetiawan. SU: *"Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.
- Ketaren, Nurlela. 2006. *Bahan Kuliah Azas-Azas Manajemen*. Medan.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga. Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.

Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Wrihatnolo, Randy R dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan*

*Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.

### **Media Internet**

Aristo, D.A. 2004. *Rejuvinasi Peran Perencana dalam Menghadapi Era Partisipatif, "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Disampaikan dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang. Teknik Planologi ITB. <http://www.mirror.depsos.go.id/>.

Indonesia arrived from [google.co.id](http://google.co.id) on "Turindra Corporation Indonesia (TCI): Pengertian Partisipasi". Diakses pada hari senin 24 Januari pukul 12:07.

### **Skripsi**

Amalia S. Tapparang. 2010. *Model Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Andi Sayumitra. 2009. *Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Sumatera Utara.

### **Tesis**

M. Arifin Nst. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010)*. Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.